



## Analisis Gaya Bahasa Sarkasme terhadap Pejabat Saat Memberikan Bantuan pada Bencana Alam Sumatra 2025

Jeni Andari<sup>1</sup>, Suci Septia Anggraini<sup>2</sup>, Novi Anggraini<sup>3</sup>, Mastiara<sup>4</sup>

[Jeniandari07@gmail.com](mailto:Jeniandari07@gmail.com)

[suciseptiaanggraink@gmail.com](mailto:suciseptiaanggraink@gmail.com)

[Novianggraini0602@gmail.com](mailto:Novianggraini0602@gmail.com)

[mastiara293@gmail.com](mailto:mastiara293@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

### Abstrak

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatra pada November-Desember 2025 tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi hampir 1.000 keluarga korban, tetapi juga memunculkan gelombang kritik tajam terhadap cara pemerintah berkomunikasi dalam situasi darurat. Kritik tersebut banyak disampaikan dalam bentuk sarkasme sindiran kasar yang menyentil ketidakpekaan dan kelambanan aparat. Tulisan ini mencoba membedah fenomena penggunaan sarkasme sebagai senjata kritik masyarakat, khususnya ketika berhadapan dengan pernyataan-pernyataan pejabat yang dinilai mengecewakan. Dengan menggunakan pendekatan pragmatik dan analisis wacana kritis, kajian ini menemukan bahwa sarkasme muncul bukan tanpa alasan ia lahir dari ketidaksesuaian mencolok antara apa yang diucapkan pejabat dengan kenyataan pahit di lapangan, ditambah respons yang terkesan setengah hati dan minimnya empati dalam berkomunikasi. Temuan menunjukkan sarkasme telah menjadi cara efektif bagi rakyat untuk menyuarakan ketidakpuasan di tengah dominasi media sosial, sekaligus menandai adanya krisis dalam tata kelola komunikasi kebencanaan yang mendesak untuk diperbaiki.

**Kata Kunci:** sarkasme, komunikasi krisis, bencana Sumatra 2025, kritik sosial, pragmatik

### Abstract

The flash floods and landslides that struck Sumatra in November–December 2025 not only left deep sorrow for nearly 1,000 affected families, but also triggered a wave of sharp criticism regarding the government’s communication during emergency situations. Much of this criticism was expressed in the form of harsh, sarcastic remarks that highlighted the insensitivity and slowness of authorities. This paper examines the phenomenon of sarcasm as a tool of public criticism, particularly when responding to statements made by officials that were perceived as disappointing.

Using a pragmatic approach and critical discourse analysis, this study finds that sarcasm does not emerge without reason; rather, it arises from a striking mismatch between officials’ statements and the harsh realities on the ground, compounded by responses that appeared half-hearted and lacking in empathy in communication. The findings show that



sarcasm has become an effective means for the public to voice dissatisfaction amid the dominance of social media, while simultaneously signaling a crisis in disaster communication governance that urgently needs improvement.

**Keywords:**

sarcasm, crisis communication, Sumatra disaster 2025, social criticism, pragmatics

**Pendahuluan**

Akhir November 2025 mencatat sejarah kelam bagi masyarakat Sumatra. Banjir bandang dan longsor yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merenggut nyawa ratusan orang dalam hitungan hari. Hingga pertengahan Desember, data BNPB mencatat 990 jiwa melayang, 222 orang masih hilang, dan lebih dari 157.800 rumah rusak atau hanyut tersapu lumpur. Curah hujan ekstrem mencapai 300 milimeter per hari yang dipicu Siklon Tropis Senyar menjadi pemicu langsung tragedi ini. Namun, bencana alam bukanlah satu-satunya yang menimpa warga Sumatra. Ada bencana lain yang tak kalah menyakitkan: bencana komunikasi dari para pejabat yang seharusnya memimpin penanganan krisis.

Berbagai pernyataan pejabat negara justru memantik kemarahan publik. Ada yang bilang kondisinya "tidak terlalu mengkhawatirkan" meski ratusan nyawa sudah melayang. Ada pula yang menilai situasi "mencekam di media sosial" tapi belum layak disebut bencana nasional. Bahkan, ketika kayu-kayu gelondongan hanyut bersama banjir diduga hasil pembalakan liar sejumlah pejabat masih berupaya membela dengan dalih "pohon tercabut alami." Pernyataan-pernyataan semacam ini tentu saja tidak diterima begitu saja oleh masyarakat. Alih-alih mendapat simpati, para pejabat malah kebanjiran sindiran pedas dari netizen yang geram.

Sarkasme kemudian menjadi senjata utama rakyat untuk mengkritik. Bukan sekadar sindiran biasa, sarkasme adalah bentuk celaan paling kasar dalam hierarki bahasa kiasan lebih tajam dari ironi, lebih menusuk dari sinisme (Keraf, 2009). Dalam konteks bencana Sumatra 2025, penggunaan sarkasme mencerminkan jurang pemisah antara harapan rakyat dengan kenyataan yang mereka terima dari pemerintah. Menariknya, era media sosial memberikan ruang bagi sarkasme untuk menyebar cepat, viral, dan akhirnya memaksa pejabat untuk lebih berhati-hati atau setidaknya berpura-pura peduli.

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan: mengapa sarkasme menjadi pilihan bahasa dalam mengkritik pejabat saat bencana?, Apa saja bentuk sarkasme yang muncul?, Dan yang



lebih penting, apa fungsi sosial dari ledakan sarkasme tersebut dalam konteks komunikasi kebencanaan di Indonesia? Dengan membedah persoalan ini, diharapkan ada pembelajaran bagi pemerintah dalam memperbaiki cara berkomunikasi saat krisis, agar tidak lagi menjadi bahan ejekan di tengah duka yang mendalam.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Sarkasme sebagai Senjata Kritik**

Gorys Keraf (2009) dalam bukunya yang melegenda, "Diksi dan Gaya Bahasa," menempatkan sarkasme sebagai majas sindiran paling tajam. Kalau ironi masih terselubung dan sinisme hanya menunjukkan ketidakpercayaan, maka sarkasme langsung menohok dengan celaan keras yang nyaris tanpa basa-basi. Tarigan (2013) menambahkan bahwa sarkasme efektif sebagai alat kritik sosial justru karena kemampuannya membuka kontradiksi antara harapan dengan realitas secara blak-blakan.

Dalam perkembangannya, Gibbs dan Colston (2007) melihat sarkasme bukan cuma urusan bahasa, tapi juga psikologi sosial. Ketika orang menggunakan sarkasme, sebenarnya mereka sedang melampiaskan frustrasi terhadap situasi yang dianggap absurd atau tidak adil. Ada semacam kepuasan batin ketika bisa membalik logika orang yang dikritik dengan cara yang mengejek. Dalam konteks bencana, sarkasme menjadi katup pelepas tekanan emosional masyarakat yang merasa diabaikan.

### **Komunikasi Krisis yang Gagal**

Teori Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Coombs (2015) sebenarnya sudah memberikan panduan jelas: saat krisis, pejabat harus menunjukkan empati, transparan, cepat bertindak, dan siap bertanggung jawab. Sayangnya, prinsip-prinsip ini sering dilupakan atau memang sengaja diabaikan. Ketika komunikasi krisis gagal, yang terjadi bukan hanya kehilangan kepercayaan publik, tapi juga munculnya krisis reputasi yang lebih parah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebenarnya sudah mengamanatkan bahwa komunikasi kebencanaan harus informatif, edukatif, dan memberi rasa aman. Tapi bagaimana bisa memberi rasa aman kalau pejabat sendiri masih sibuk meremehkan skala bencana? Bagaimana bisa edukatif kalau informasi yang disampaikan justru bertentangan dengan fakta di lapangan?



Seeger (2006) menekankan pentingnya kecepatan, konsistensi, dan sensitivitas dalam komunikasi krisis. Ketika tiga hal ini tidak terpenuhi, masyarakat akan mencari cara sendiri untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka. Dan di era digital, cara paling ampuh adalah melalui kritik viral yang dikemas dalam bentuk humor gelap atau sarkasme.

### **Media Sosial: Arena Kritik Tanpa Batas**

Van Dijck (2013) menjelaskan bahwa media sosial telah mengubah peta kekuatan dalam komunikasi publik. Kalau dulu rakyat harus lewat jalur formal untuk menyampaikan kritik surat pembaca, demo, atau menemui anggota dewan sekarang cukup dengan sekali tweet atau posting di Instagram, suara bisa langsung terdengar oleh ribuan bahkan jutaan orang. Tidak heran jika media sosial menjadi medan pertempuran opini yang paling ramai saat terjadi bencana.

Castells (2012) menyebut fenomena ini sebagai "gerakan sosial berjejaring." Kritik yang awalnya muncul dari satu dua akun, dengan cepat bisa bergulir menjadi tagar nasional. Seperti yang terjadi dengan #PrayForSumatera dan #AlleyesonSumatera yang ramai diperbincangkan, meski respons pemerintah terkesan lambat dan setengah hati. Media sosial memberikan ruang bagi rakyat untuk tidak hanya mengkritik, tapi juga mengorganisir solidaritas dan menekan pemerintah agar bertindak lebih serius.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis ala Norman Fairclough. Fokusnya pada pernyataan-pernyataan pejabat terkait bencana Sumatra 2025 yang dimuat di media massa dan media sosial, serta bagaimana publik merespons dengan bahasa sarkasme. Data dikumpulkan dari berbagai sumber: berita online, unggahan media sosial, transkrip wawancara pejabat, dan pernyataan resmi pemerintah selama periode November-Desember 2025.

Proses analisis dilakukan bertahap. Pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk sarkasme yang digunakan netizen apakah berupa parodi, pembalikan logika, atau sindiran langsung. Kedua, melihat konteks kemunculan sarkasme tersebut: pernyataan pejabat mana yang memicu reaksi, kapan waktu munculnya, dan seberapa luas penyebarannya. Ketiga, menafsirkan fungsi sosial dari sarkasme dalam kerangka komunikasi kebencanaan yang lebih luas.



Untuk memastikan keandalan data, dilakukan triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber berita dan memverifikasi kebenaran pernyataan-pernyataan yang dikritik. Beberapa pernyataan dikonfirmasi langsung dari situs resmi instansi terkait atau rekaman video wawancara pejabat yang beredar di media.

## Hasil dan Pembahasan

### Akar Masalah: Pernyataan Kontroversial Pejabat

Kemarahan publik terhadap pemerintah tidak muncul dari ruang hampa. Ada rangkaian pernyataan pejabat yang dianggap tidak sensitif, bahkan cenderung mengabaikan penderitaan korban. Kepala BNPB Suharyanto, misalnya, sempat bilang bahwa kondisi di Tapanuli Selatan "tidak terlalu mengkhawatirkan." Pernyataan ini keluar sebelum ia turun langsung ke lapangan. Begitu melihat sendiri kondisi yang sebenarnya, ia baru meminta maaf karena ternyata situasinya jauh lebih parah dari bayangan (Riau Online, 2025). Tapi maaf yang terlambat tetap meninggalkan luka.

Ada juga kontroversi soal status bencana nasional. Meski korban jiwa sudah ratusan, pemerintah sempat menolak menetapkan status darurat nasional dengan alasan yang terkesan teknis dan birokratis. Kepala BNPB bahkan menyebut situasi "mencekam di media sosial" tapi belum memenuhi kriteria nasional. Anggota DPR Yanuar Arif Wibowo sampai geram: "Masa iya 700 meninggal dunia dianggap biasa-biasa saja? Ini anak bangsa" (Parlementaria, 2025). Pernyataan seperti ini menunjukkan ada jarak yang sangat jauh antara perspektif pejabat di Jakarta dengan realitas di Sumatra yang paling memancing emosi adalah soal kayu gelondongan. Ribuan batang kayu hanyut terbawa banjir, diduga kuat hasil pembalakan liar. Namun, beberapa pejabat justru membela dengan argumen bahwa itu "pohon yang tercabut secara alami" karena hujan deras. Publik langsung bereaksi: kalau memang alami, kenapa kayunya sudah terpotong rapi? Kenapa ada yang sudah berbentuk gelondongan siap jual? Pembelaan yang terkesan menutupi masalah ini justru menambah kecurigaan publik terhadap dugaan kolusi antara pejabat dan pengusaha kayu ilegal (Parlementaria, 2025).

Presiden Prabowo Subianto sendiri baru mengunjungi lokasi bencana seminggu setelah tragedi terjadi. Padahal, BMKG sudah mengeluarkan peringatan delapan hari sebelumnya tentang potensi siklon tropis. Keterlambatan ini memicu narasi ketimpangan: kalau bencana terjadi di Jawa, khususnya Jakarta, respon pemerintah biasanya jauh lebih cepat. Tapi kalau



di luar Jawa? Tunggu seminggu dulu. Ketimpangan ini kemudian menjadi bahan bakar utama bagi gelombang sarkasme di media sosial.

### **Ragam Sarkasme dalam Kritik Publik**

Dari analisis data, ditemukan beberapa pola sarkasme yang digunakan netizen untuk mengkritik pejabat:

Sarkasme minimalisasi. Ini adalah bentuk sarkasme yang paling umum. Netizen membalik pernyataan pejabat dengan nada ironis: "Tenang, ini cuma banjir biasa kok," atau "Hanya 990 korban jiwa, belum cukup syarat bencana nasional, santai aja." Ada juga yang mengatakan, "Banjir setinggi lima meter? Ah, biasa lah, namanya juga musim hujan." Sarkasme jenis ini menunjukkan absurditas dari sikap pemerintah yang meremehkan skala bencana. Dengan mengulang pernyataan pejabat dalam konteks yang lebih ekstrem, netizen ingin menunjukkan betapa tidak masuk akal nya sikap tersebut.

Sarkasme perbandingan regional. Ini menyoroti ketimpangan perhatian pemerintah terhadap berbagai daerah. Salah satu komentar yang viral berbunyi: "Jakarta banjir setinggi mata kaki, langsung trending nasional. Sumatra tenggelam, baru trending setelah seminggu." Ada juga yang bilang, "Kalau ini terjadi di Jawa, mungkin helikopter presiden sudah terbang sejak hari pertama." Sarkasme ini tidak hanya mengkritik lambatnya respons, tapi juga menunjukkan kesenjangan struktural dalam perhatian pemerintah pusat terhadap daerah-daerah di luar Jawa.

Sarkasme ekologis. Respons terhadap pembelaan soal kayu gelondongan memunculkan sindiran-sindiran tajam: "Ternyata pohon-pohon di Sumatra suka bunuh diri massal kalau hujan," atau "Hebat ya alam Indonesia, pohonnya bisa tumbang sambil memotong diri sendiri jadi gelondongan rapi." Ada juga yang berkomentar, "Luar biasa, pohon-pohon kita sudah evolusi, bisa motong diri sendiri tanpa gergaji." Sarkasme ini mengkritik upaya menutupi kerusakan lingkungan sistematis yang sudah berlangsung lama di hutan Sumatra.

Sarkasme administratif-birokratis. Terkait penolakan status bencana nasional, muncul komentar seperti: "Yang penting bukan statusnya, tapi penanganannya sambil tidak ditangani dengan baik juga." Ada juga yang bilang, "Status bencana nasional kan cuma formalitas, yang penting kita sudah berdoa bersama di Jakarta." Sarkasme ini menyindir kontradiksi



antara pernyataan pejabat dengan kenyataan di lapangan, di mana bantuan tetap lambat datang meski pejabat sudah bilang status tidak penting.

Sarkasme temporal. Mengkritik keterlambatan respons dengan komentar seperti: "Syukurlah presiden akhirnya datang, tepat waktu untuk pemakaman hari ketujuh korban," atau "Alhamdulillah, bantuan akhirnya tiba setelah korban sudah dikubur semua." Sarkasme ini paling menyakitkan karena menyentuh soal waktu hal yang paling krusial dalam penanganan bencana.

### **Fungsi Sosial Sarkasme: Lebih dari Sekadar Sindiran**

Mengapa masyarakat memilih sarkasme sebagai cara berkomunikasi? Ada beberapa fungsi penting yang bisa dijelaskan:

*Pertama*, sarkasme sebagai kritik tanpa risiko. Di negara dengan kultur paternalistik yang kuat seperti Indonesia, mengkritik pejabat secara frontal bisa berisiko mulai dari dilabeli sebagai "tidak tahu sopan santun" hingga ancaman hukum pencemaran nama baik. Sarkasme memberikan ruang aman untuk menyampaikan kritik keras tanpa terlalu gamblang. Dengan bungkus humor dan sindiran, kritik jadi lebih "aman" meski tetap menusuk. Media sosial memungkinkan kritik tersebut menyebar dengan cepat sebelum sempat dibungkam.

*Kedua*, katarsis kolektif. Bencana adalah momen penuh tekanan emosional. Ketika melihat pemerintah gagal memberikan respons yang memadai, kemarahan dan frustrasi menumpuk. Sarkasme menjadi cara untuk melampiaskan emosi tersebut secara kolektif. Ketika satu orang menulis komentar sarkastik dan mendapat ribuan likes atau retweets, ada kepuasan psikologis bahwa perasaannya divalidasi oleh banyak orang. Ini menciptakan solidaritas emosional di antara mereka yang merasa kecewa.

*Ketiga*, dekonstruksi narasi kuasa. Pemerintah, dengan segala aparatusnya, memiliki kuasa besar untuk membentuk narasi publik melalui konferensi pers, pernyataan resmi, dan media mainstream yang cenderung pro-pemerintah. Sarkasme berfungsi sebagai alat untuk membongkar narasi tersebut. Dengan membalik logika pernyataan pejabat, netizen menunjukkan kontradiksi dan kebohongan yang tersembunyi di balik retorika resmi. Ini adalah bentuk perlawanan diskursif yang efektif di era post-truth.

*Keempat*, pendidikan publik lewat humor. Sarkasme yang viral tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik. Ketika netizen membuat sindiran soal ketimpangan Jawa-luar Jawa, misalnya, mereka sebenarnya sedang mengajarkan isu struktural kepada publik yang



lebih luas. Banyak orang yang tadinya tidak tahu soal ketimpangan infrastruktur atau alokasi anggaran, jadi terbuka matanya lewat sindiran-sindiran yang beredar. Humor membuat isu berat jadi lebih mudah dicerna dan diingat.

*Kelima*, memaksa akuntabilitas. Beberapa pejabat akhirnya meminta maaf setelah pernyataan mereka jadi sasaran kritik viral. Kepala BNPB, misalnya, meminta maaf setelah pernyataannya tentang kondisi "tidak mengkhawatirkan" jadi bahan ejekan di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa sarkasme publik punya dampak nyata: ia memaksa pejabat untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, atau setidaknya pura-pura peduli setelah ketahuan tidak peduli.

### **Implikasi bagi Tata Kelola Komunikasi Krisis**

Gelombang sarkasme dalam kasus bencana Sumatra 2025 seharusnya jadi alarm bagi pemerintah bahwa ada yang salah dalam cara mereka berkomunikasi saat krisis. Berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi krisis yang dikemukakan Coombs (2015) dan Seeger (2006), ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil.

**Empati bukan opsional, tapi wajib.** Pejabat harus paham bahwa saat bencana, masyarakat tidak hanya butuh informasi teknis atau data statistik. Mereka butuh merasa didengar dan dipahami. Pernyataan yang terkesan meremehkan atau defensif hanya akan menambah luka. Kalau memang belum tahu kondisi sebenarnya, lebih baik bilang "kami sedang mengumpulkan informasi" daripada bilang "tidak terlalu mengkhawatirkan" yang ternyata meleset jauh.

**Kecepatan adalah nyawa.** Di era media sosial, berita menyebar dalam hitungan menit. Kalau pemerintah lambat merespons, narasi alternative termasuk kritik dan rumor akan mengisi kekosongan informasi. Keterlambatan satu minggu dalam kunjungan presiden atau penetapan status darurat adalah waktu yang cukup lama bagi kemarahan publik untuk mengkristal menjadi gerakan kritik masif. Pemerintah harus punya mekanisme respons cepat yang tidak tergantung pada birokrasi berbelit.

**Transparansi lebih dihargai daripada pembelaan.** Ketika ada dugaan pembalakan liar yang terbukti dari kayu gelondongan hanyut, upaya membela dengan argumen "tumbang alami" justru kontraproduktif. Publik bukan bodoh. Mereka bisa membedakan mana pohon tumbang alami dan mana kayu hasil tebangan. Kalau pemerintah mengakui ada masalah dan



berjanji menindak tegas pelaku, respons publik akan jauh lebih positif. Tapi kalau malah menutupi, kepercayaan akan semakin terkikis.

**Konsistensi pesan itu krusial.** Ketika satu pejabat bilang "tidak mengkhawatirkan" tapi pejabat lain bilang "situasi serius," publik jadi bingung dan akhirnya tidak percaya siapa-siapa. Pemerintah butuh koordinasi yang solid dalam komunikasi krisis agar tidak ada pesan yang saling bertentangan. Ini juga berlaku untuk konsistensi antara perkataan dan tindakan: kalau bilang "bantuan segera datang" tapi kenyataannya baru tiba seminggu kemudian, ya jelas akan dikritik habis-habisan.

## Kesimpulan

Fenomena meledaknya sarkasme publik terhadap pejabat saat bencana Sumatra 2025 adalah cerminan kegagalan komunikasi krisis pemerintah. Sarkasme bukan muncul karena netizen jail atau suka cari sensasi, tapi karena ada jurang lebar antara harapan masyarakat dengan realitas yang mereka terima. Ketika pejabat bilang "tidak mengkhawatirkan" sementara ratusan mayat masih bergelimpangan, ketika kayu gelondongan hasil illegal logging dibela sebagai "tumbang alami," ketika presiden baru datang seminggu setelah bencana maka wajar saja kalau publik marah. Dan di era digital, kemarahan itu diekspresikan dalam bentuk yang paling viral: sarkasme.

Berbagai bentuk sarkasme yang muncul dari minimalisasi, perbandingan regional, kritik ekologis, hingga sindiran birokratis semuanya menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengkritik aspek teknis penanganan bencana, tapi juga dimensi moral dan simbolik dari sikap pemerintah. Mereka mempertanyakan: apakah pemerintah benar-benar peduli, atau hanya peduli saat media nasional mulai sorot? Apakah nyawa rakyat di luar Jawa punya nilai yang sama dengan nyawa rakyat di Jawa?

Sarkasme juga membuktikan dirinya sebagai alat kritik yang efektif di era media sosial. Ia menyebar cepat, mudah dipahami, menghibur sekaligus mendidik, dan yang terpenting: memaksa pejabat untuk lebih akuntabel. Beberapa pejabat akhirnya meminta maaf, meski terlambat, setelah kena kritik viral. Ini menunjukkan bahwa suara rakyat meski disampaikan lewat sindiran tetap punya kekuatan untuk mengubah perilaku penguasa.

Pemerintah perlu belajar dari episode pahit ini. Komunikasi krisis bukan sekadar urusan humas atau protokol, tapi soal kontrak sosial antara negara dan rakyat. Ketika rakyat sedang



berduka, mereka butuh pemimpin yang hadir, peduli, dan bertindak cepat bukan pemimpin yang sibuk membela diri atau ngeles dengan berbagai dalih teknis. Kalau pemerintah terus gagal memenuhi ekspektasi dasar ini, jangan heran kalau sarkasme akan terus jadi bahasa sehari-hari rakyat dalam berkomunikasi dengan negara.

Ke depan, perlu ada reformasi serius dalam tata kelola komunikasi kebencanaan. Pejabat yang terlibat dalam penanganan bencana harus mendapat pelatihan komunikasi krisis yang memadai. Harus ada protokol jelas tentang siapa yang berbicara, kapan berbicara, dan bagaimana berbicara agar pesan yang disampaikan konsisten dan empatik. Dan yang paling penting: pemerintah harus ingat bahwa di era digital, setiap kata akan dianalisis, dikritisi, dan kalau nyeleneh akan jadi bahan meme yang beredar selamanya.

Sarkasme publik adalah bentuk kritik yang pedih, tapi juga jujur. Ia menunjukkan bahwa rakyat masih peduli, masih berharap, meski sudah kecewa berkali-kali. Tugas pemerintah adalah mendengarkan kritik tersebut sekeras apa pun bentuknya dan menjadikannya pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Karena bencana alam memang tidak bisa dicegah, tapi bencana komunikasi sepenuhnya bisa dihindari kalau ada kemauan politik untuk belajar dan berubah.

#### Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Data korban bencana banjir dan longsor Sumatra. Diakses dari <https://bnpb.go.id>
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Cambridge: Polity Press.
- Coombs, W. T. (2015). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Drone Emprit. (2025). Sentimen publik terhadap penanganan bencana di Sumatera. Diakses 14 Desember 2025 dari <https://pers.droneemprit.id>
- Gibbs, R. W., & Colston, H. L. (2007). *Irony in language and thought: A cognitive science reader*. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
- Keraf, G. (2009). *Diksi dan gaya bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Parlementaria. (2025). Pejabat publik minim empati soal banjir Sumatra. Diakses 14 Desember 2025 dari <https://emedia.dpr.go.id>



- Riau Online. (2025). Rentetan permintaan maaf pejabat negara di tengah sorotan bencana Sumatera. Diakses 14 Desember 2025 dari <https://www.riauonline.co.id>
- Tarigan, H. G. (2013). *Pengajaran gaya bahasa*. Bandung: Angkasa.
- The Conversation. (2025). Banjir Sumatra: Respons pemerintah minim kemauan politik. Diakses 14 Desember 2025 dari <https://theconversation.com>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Van Dijck, J. (2013). *The culture of connectivity: A critical history of social media*. Oxford: Oxford University Press.

